

V

Kepada Yth.
Ketua Jurusan/Bagian Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Semarang

Dengan ini saya mohon agar karya ilmiah terlampir dinilai. Untuk penilaian tersebut, saya sampaikan informasi dan usul sebagai berikut :

Nama : Dra. Sri Widowati H, M.S,
Judul : Pengupahan Buruh dalam Bingkai Media (C10)

KATEGORI KARYA ILMIAH

- Hasil Penelitian yang dipublikasikan :
- Hasil Penelitian yang Tidak Dipublikasikan
- Hasil Pemikiran
- Menerjemahkan/Menyadur Buku Ilmiah
- Hasil Rancangan dan Karya Teknologi yang dipatenkan

DALAM BENTUK :

- Monografi
- Buku Referensi
- Majalah Ilmiah Internasional
- Majalah Ilmiah Nasional Terakreditasi
- Majalah Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
- Disajikan melalui Seminar Internasional
- Disajikan melalui Seminar Nasional
- Poster melalui Seminar Internasional
- Poster melalui Seminar Nasional
- Lap. Penelitian di Perpustakaan

PERAN SERTA DALAM KARYA ILMIAH :

Saya sebagai : Penulis Utama
 Penulis Pendamping

Peran rekan lain : Tidak ada : Ada

Nama :
 Nama : Nama :
 Nama : Nama :

Untuk karya ilmiah tersebut di atas.

Saya mengusulkan nilai :

Semarang,

Dra. Sri Widowati H, M.S
NIP.195603141981032001

DIISI OLEH TPTJ/TPTB

Berdasarkan pra penelitian TPTJ/TPTB
maka TPTJ/TPTB sepakat memberikan nilai :

DIISI OLEH TPTF

TPTF sepakat memberikan nilai :

Tim Penilai Tingkat Jurusan/Bagian
Semarang,

DRA. TAUFIK SUPRIHATINI, M.SI
NIP.195303021980032001

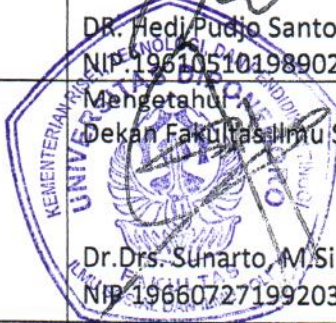
Tim Penilai Tingkat Fakultas
Semarang,

DR. Hedi Pudjo Santoso, M.Si
NIP.196105101989021002

Mengetahui :
Ketua Jurusan/Bagian

Dr.Hapsari Dwiningtyas, S.Sos,M.A
NIP 197507231998022001

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr.Drs. Sunarto, M.Si
NIP.196607271992031001

DIISI OLEH TPTU

TPTU MEMBERIKAN NILAI :

Mengetahui :
Sekretaris Senat

Prof.Dr. Ir. Sunarso, MS
NIP.195205201980021002

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul karya ilmiah (Paper) : Pengupahan Buruh Dalam Bingkai Media
 Jumlah penulis : 1 orang
 Status pengusul : penulis ke 1

Identitas Makalah : a. Judul Prosiding : Prosiding ICCIC Komunikasi Industri & Komunitas
 b. ISBN/ISSN : 978-602-74139-1-7
 c. Tahun Terbit, tempat pelaksanaan : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara
 d. Penerbit/Organiser : Fak. Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara
 e. Alamat repository :
 f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : *Prosiding* Forum Ilmiah Internasional
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) *Prosiding* Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai5)	Nilai Maksimal <i>Prosiding</i> 6)		Nilai Yang Diperoleh 7)
	Internasional <input type="checkbox"/> 15	Nasional <input type="checkbox"/> 10	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	1,5	0,9	0.8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,5	2,7	2.5
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	4,5	2,7	2.5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan /prosiding (30%)	4,5	2,7	2.3
Total = (100%)	15	10	8.1

Semarang,

2016

Reviewer 1



Dr.Drs.Turnomo Rahardjo, M.Si

NIP 1962061419860320029

Unit kerja : FISIP UNDIP

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul karya ilmiah (Paper) : Pengupahan Buruh Dalam Bingkai Media

Jumlah penulis : 1 orang
Status pengusul : penulis ke 1

Identitas Makalah : a. Judul Prosiding : Prosiding ICCIC Komunikasi Industri & Komunitas
b. ISBN/ISSN : 978-602-74139-1-7
c. Tahun Terbit, tempat pelaksanaan : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara
d. Penerbit/Organiser : Fak. Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara
e. Alamat repository :
f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Forum Ilmiah Internasional
(beri ✓ pada kategori yang tepat) Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

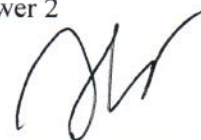
Komponen Yang Dinilai5)	Nilai Maksimal <i>Prosiding</i> 6)		Nilai Yang Diperoleh 7)
	Internasional <input type="checkbox"/> 15	Nasional <input type="checkbox"/> 10	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	1,5	0,9	0,7
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4,5	2,7	2,4
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	4,5	2,7	2,6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan /prosiding (30%)	4,5	2,7	2,2
Total = (100%)	15	10	7,9

Perlu pertajaman Analisis teoritis

Semarang,

2016

Reviewer 2



Dr.Hapsari Dwiningtyas,S.Sos, M.A

NIP 197507231998022001

Unit kerja : FISIP UNDIP

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul karya ilmiah (Paper) : Pengupahan Buruh Dalam Bingkai Media

Jumlah penulis : 1 orang
Status pengusul : penulis ke 1

Identitas Makalah : a. Judul Prosiding : Prosiding ICCIC Komunikasi Industri & Komunitas
b. ISBN/ISSN : 978-602-74139-1-7
c. Tahun Terbit, tempat pelaksanaan : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara
d. Penerbit/Organiser : Fak. Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara
e. Alamat repository :
f. Terindeks di (jika ada) :

Kategori Publikasi Makalah : *Prosiding* Forum Ilmiah Internasional

(beri ✓ pada kategori yang tepat) *Prosiding* Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai5)	Nilai Reviewer 6)		Nilai rata-rata 7)
	Reviewer I	Reviewer II	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	0,8	0,7	0,75
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	2,5	2,4	2,45
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	2,5	2,6	2,55
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan /prosiding (30%)	2,3	2,2	2,25
Total = (100%)	8,1	7,9	8

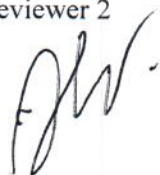
Catatan Penilaian paper oleh Reviewer :

Masalah ini (isinya) semenjelas kajian keilmuan komunikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
- Perlu penajaman analisis kritis

Semarang,

2016

Reviewer 2

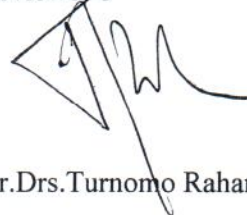


Dr. Hapsari Dwiningtyas, S.Sos, M.A

NIP 197507231998022001

Unit kerja : FISIP UNDIP

Reviewer 1



Dr. Drs. Turnomo Rahardjo, M.Si

NIP 1962061419860320029

Unit kerja : FISIP UNDIP



International Conference of
Communication Industry
and Community, Bali 2016

PROSIDING ICCIC :
**KOMUNIKASI
INDUSTRI
& KOMUNITAS**



3

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE OF COMMUNICATION, INDUSTRY
AND COMMUNITY

Cetakan ke-1, Februari 2016
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
Seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Editor:
Widayatmoko, Septia Winduwati

Desain dan tata letak:
Xenia Angelica

Cetakan ke-1, Jakarta, FIKom UNTAR 2016
ix-385 hlm, ukuran 7,17 x 10,12 inch

ISBN
978-602-74139-1-7

Diterbitkan oleh:
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara
Jl. Letjen S. Parman No. 1
Jakarta Barat 11440

**PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE OF
COMMUNICATION, INDUSTRY AND COMMUNITY 2016**

Reviewer:

Ahmad Djunaidi

Asep

Atwar Bajari

Chairy

Dorien Kartikawangi

Eko Harry Susanto

Endah Murwani

I Nengah Duija

Juliana Abdul Wahab

Kurniawan Hari Siswoko

Nurdin Abd Halim

Pengupahan Buruh Dalam Bingkai Media Sri Widowati H.....	1074—1085
Iklan Politik sebagai Media Komunikasi Kandidat Dalam Kontestasi Politik Lokal (Studi Analisis Isi Terhadap Iklan Politik Para Kandidat Calon Bupati & Wakil Bupati Sidoarjo dalam Pilkada Serentak 2015) Agusly Irawan Aritonang.....	1086—1105
Iklan Politik Surat Kabar (Studi Pada Kampanye Politik Pada Pemilu pada Kota Pekanbaru) Muhd AR Imam Riauan.....	1106—1116
Opini Pemilih Pemula Terhadap Kampanye Politik Melalui Media Baru (Studi Pada Mahasiswa Marketing Communication Bina Nusantara University Terhadap Berita Online <i>viva.co.id</i> dan <i>mediaindonesia.com</i> Tentang Kampanye Politik Calon Presiden 2014) Vivien Sylvina.....	1117—1126
Ulasan Studi Petunjuk Komunikasi Pengelabuan Bermediasi Komputer Reny Yuliaty.....	1127—1140
Pertahanan Identitas Dan Hambatan Komunikasi Etnik Pendatang (Studi Kasus Pada Desa Kampung Bogor Kabupaten Kepahyang Bengkulu) Alfarabi.....	1141—1152
Integrasi Tanggung Jawab Sosial Korporat (CSR) dan Pendidikan Alam Sekitar untuk Kelestarian Karmilah Abdullah, Jamilah Ahmad, Suriati Saad.....	1153—1165

PENGUPAHAN BURUH DALAM BINGKAI MEDIA

Sri Widowati Herieningsih
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
herieningsih@gmail.com

Abstract

Discourse government issued a new formula increase in the provincial minimum wage (UMP) annually through PP No. 78/2015, causing a variety of reactions from various parties, who support or reject reaction, followed by a workers' demonstration. PP plans Wage laborers who then set into PP, widely reported by the media. This study was conducted to determine the framing is done Suara Merdeka associated with the issuance of policy packages IV, with new rumusan provincial minimum wage increases, through PP No. 78/2015. The method used is the analysis of framing of Robert N. Ennart, such as problem identification, diagnosis causes, moral evaluation and treatment recommendation. The theory used is the theory of the construction of the reality of Berger and Luckman. The results showed, that differences of opinion or viewpoint between employers and workers attended the demonstrations in addressing PP No. 78/2015. In the end Suara Merdeka presents the agreement between the interested parties such as the central government, provinces, employers and workers, to promote common interests that the world climate conducive usaha.

Keywords: *construction of reality, framing, wage laborers, PP No. 78/2015*

Abstrak

Wacana pemerintah mengeluarkan rumus baru kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tiap tahun melalui PP no 78/2015, menimbulkan berbagai macam reaksi dari berbagai pihak, reaksi yang mendukung maupun menolak, yang diikuti oleh demonstrasi buruh. Rencana PP Pengupahan buruh yang kemudian ditetapkan menjadi PP, banyak diberitakan oleh media massa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembingkaihan yang dilakukan Suara Merdeka berkaitan dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi IV, dengan rumusan baru kenaikan upah minimum provinsi, melalui PP no 78/2015. Metoda yang digunakan adalah analisis framing dari Robert N. Ennart, berupa problem identification, diagnose causes, moral evaluation dan treatment recommendation. Teori yang digunakan adalah teori konstruksi realitas dari Berger dan Luckman. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terjadi perbedaan pendapat atau sudut pandang diantara pengusaha dan buruh yang diikuti berbagai demonstrasi dalam menyikapi PP no 78/2015. Pada akhirnya Suara Merdeka menyajikan terjadinya kesepakatan diantara pihak pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat, provinsi, pengusaha dan buruh, untuk mengedepankan kepentingan bersama agar iklim dunia usaha kondusif.

Kata kunci: *konstruksi realitas, framing, pengupahan buruh, PP no 78/2015*

Pendahuluan

Demo buruh merupakan suatu peristiwa yang terus terjadi diberbagai kota disetiap pengujung tahun terkait dengan rencana kenaikan upah minimal buruh. Demo buruh yang terjadi merupakan bukti terjadinya konflik antara buruh, pengusaha serta pada sisi lain ada pemerintah pusat dan provinsi.

Pada akhir tahun 2015, demo buruh terjadi diberbagai kota, ketika pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi IV, dengan rumusan baru tentang kenaikan upah minimum provinsi (UMP) setiap tahun. Rumusan baru tersebut akan disahkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini sudah diandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Cara baru hitung upah buruh adalah : (1) UMP tahun depan sama dengan UMP tahun ini, ditambah UMP tahun ini dikalikan inflasi plus tingkat pertumbuhan ekonomi, (2) Penghitungan UMP dilakukan tiap tahun, (3) Bertaku secara nasional mulai Januari 2016, kecuali di delapan propinsi, (4) delapan propinsi dicekualikan karena upah saat ini belum mencapai 100% kebutuhan hidup layak (KHL), penundaan di wilayah tersebut berlangsung empat tahun (Sumber Menko Perekonomian Darmin Nasution, dikutip Suara Merdeka 16 Oktober 2015). Hal ini memberikan kepastian pekerja bahwa upah naik tiap tahun, dan kepastian bagi dunia usaha agar upah bisa diprediksi. Tujuan utama kebijakan menurut Menteri Ketenaga kerjaan Hamid Dhakini di Istana Negara, adalah memastikan perluasan kesempatan kerja dan penciptaan kerja seluas luasnya. Iklim investasi dan dunia usaha akan kondusif. Lapangan pekerjaan makin luas, dan calon calon tenaga kerja punya pilihan, bargaining mereka meningkat.

Rencana pengupahan tersebut memunculkan kontroversi. Kalangan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh merasa tak dibicarakan dengan mereka. Demo diberbagai kota yang dilakukan oleh buruh yang menganggap bahwa cara pengupahan baru dianggap merugikan buruh. Peristiwa ini tidak luput dari perhatian media, tidak terkecuali surat kabar Suara Merdeka. Sebuah kasus yang memiliki daya tarik sudah pasti akan menarik minat media massa untuk memberikannya. Semakin besar tingkatan kasus maka daya tarik media untuk memberikannya juga semakin tinggi. Beberapa kr, iteria untuk membuat berita diperlukan unsur unsur sebagai berikut : *conflict, significance, magnitudel, prominence, novelty, human interest, timelines, proximity*. Menurut Eryanto (2002:106-107) nilai berita dapat digambarkan sebagai berikut : *prominence* (nilai berita diukur dari dari kebesaran peristiwanya atau arti pentingnya), *human interest* (peristiwa lebih memungkinkan disebut berita kalau peristiwa banyak mengandung unsur baru, sedih dan menguras emosi khalayak), *conflict/controversy* (peristiwa yang mengandung konflik lebih potensial disebut berita), *unusual* (Berita mengandung peristiwa yang tidak biasa, peristiwa yang jarang terjadi), dan *proximity* (peristiwa yang dekat lebih banyak diberitakan dibandingkan yang jauh, baik fisik maupun emosional dengan khalayak). Tema tema konflik yang mengakibatkan terjadinya demo buruh terkait dengan upah, tetapi mengaitkan perhatian media, sangatlah sulit menghindari pemberitaan tentang

Isi media pada hakekatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan saja mempresentasikan realitas, namun bisa juga menentukan relief seperti apa yang diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya media massa memiliki peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikan. Sejalan dengan pendapat Tuchman (Severin & Tankard, 2007:400) bahwa berita merupakan konstruksi realitas sosial. Tindakan membuat berita adalah tindakan mengkonstruksi realita itu sendiri, bukan penggambaran realita.

Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori konstruksi realitas dari Berger dan Luckman (LittleJohn,2005). Konstruksi realitas berlangsung melalui interaksi dialogis berkelanjutan dalam bentuk tiga macam realitas : (1) realitas obyektif, (2) realitas simbolik, (3) realitas subyektif. Realitas obyektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas, rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan dan terpolo dalam masyarakat yang semuanya dihayati oleh individu yang secara umum disebut fakta. Realitas simbolik adalah semua ekspresi dari apa yang dinilai sebagai realitas obyektif. Bahasa dan teks media merupakan ekspresi realitas simbolik. Realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu yang dikonstruksikan melalui proses internalisasi. Herbert (dalam Eryanto,2002:19) menjelaskan realita yang hadir karena dihadirkan oleh konsep subyektif wartawan lewat konstruksi, suatu pandang tertentu dari wartawan. Realitas itu berbeda beda, tergantung pada bagaimanaana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda.

Sikap media massa, khususnya Suara Merdeka, terbelah antara mendukung rencana Peraturan Pengupahan (PP), yang merupakan sistem buruh atau pada sistem pengupahan lama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Dengan pertimbangan tersebut maka permasalahan yang menarik untuk dibahas *Bagaimana pengupahan buruh dalam bingkai harian Suara Merdeka ?*

Metodologi

Penelitian tentang pengupahan buruh dalam bingkai media, merupakan penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan pendekatan analisis framing. Pada dasarnya framing adalah metoda untuk melihat cara bercerita media atau peristiwa. Jadi analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat dan bagaimana media mengkonstruksikan realitas dan bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Dalam penelitian ini adalah bagaimana Suara Merdeka mengkonstruksikan realitas pengupahan buruh.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruksionis. Pandangan konstruksionis diperkenalkan Peter L Berger, dengan gagasannya yang memandang bahwa manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektik, dinamis dan plural secara terus menerus (dalam Eryanto,2002:13). Masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus menerus mempunyai aksi

masyarakat. Seseorang baru menjadi pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal dalam masyarakat.

Model framing yang dipakai adalah model dari Robert Entman. Entman melihat framing dalam dua dimensi dasar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek tertentu dari realitas, seleksi isu berkaitan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana yang diseleksi dan ditampilkan. Dari proses ini selalu terkandung bagian berita yang dimasukkan, tetapi ada juga yang dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.

Subyek penelitian: konstruksi dari realitas pengupahan buruh yang memunculkan demo buruh yang disajikan Suara Merdeka tahun 2015 dari bulan September- November, terdiri dari 22 berita. Pemilihan Suara Merdeka sebagai subyek penelitian karena Suara Merdeka memiliki jangkauan yang luas di Jawa Tengah karena pengupahan buruh yang menjadi fokus juga di Jawa Tengah. Disamping hal itu dengan semboyan Suara Merdeka “Perekat Komunitas Jawa Tengah”.

Kerangka Framing Robert Entman.

Define Problem. (Pendaftaran masalah)	Bagaimana suatu peristiwa dilihat ? Sebagai apa ? Atau sebagai masalah apa ?
Diagnose Causes. (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa ? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah ? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah ?
Make Moral Judgement (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah ? Nilai moral apa yang dipakai untuk menginterpretasi suatu tindakan ?
Treatment Recommendation (Merekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu ? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah ?

Define problem, adalah elemen yaang pertama kali dapat dilihat daari framing, merupakan bingkai yang paling utama, menekankan bagaimana wartawan memahami peristiwa pengupahan buruh. *Diagnose causes*, merupakan elemen framing untuk membinkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa, bisa apa (what) tetapi juga bisa siapa (who). *Make moral judgement* adalah elemen framing yang dipakai untuk memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. *Treatment Recommendation*, merupakan elemen yang dipakai untuk melihat apa yang dikehendaki wartawan, jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah (Eryanto,2002:187-189).

Hasil Temuan dan Diskusi

Framing Suara Merdeka, selama September – November tahun 2015, yang terdiri dari 22 berita tentang pengupahan buruh, yang dilihat dari empat perangkat framing dari Robert N Entman, adalah sebagai berikut.

<p>Define Problem. (Pendefinisian masalah)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demonstrasi buruh terjadi diberbagai kota, demo diwarnai bentrok. 2. Buruh tolak PP pengupahan, desak cabut RPP pengupahan. 3. Buruh mengancam akan demo lebih besar lagi dengan menutup jalan protokol, jalan tol dan bandara Achmad Yani. 4. Demo buruh dengan berjalan mundur, merupakan wujud sindiran pada pemerintah terkait kemunduran formula pengupahan.
<p>Diagnose Causes. (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket ekonomi IV Kabinet Kerja, memunculkan cara baru dalam sistem pengupahan UMP, yaitu UMP lama ditambah perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 2. PP no 78/2015 tentang pengupahan buruh.
<p>Make Moral Sjudgement. (Membuat keputusan Moral)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paket Kebijakan hanya menguntungkan pengusaha dan semakin memiskinkan buruh. RPP pengupahan sebagai simbol upah murah yang dilegalisasi. Sejumlah pasal berimplikasi memiskinkan buruh. Upah daerah lebih realistik. Serikat pekerja minta Gubernur tunduk UU no 3/2003. 2. Pengusaha menyambut baik, pengupahan sudah tepat karena menjamin kepastian investasi, terprediksi dan lebih realistik. 3. Sebaiknya menggunakan acuan dari pertumbuhan regional dan daerah, bukan pertumbuhan nasional (Direktur Institute Development of Economic and Finance) 4. Pemerintah, iklim investasi dan dunia usaha semakin kondusif dan tercipta lebih banyak lapangan kerja (Menteri Tenaga Kerja). Jangan terjadi perbedaan pandangan antara buruh dan pengusaha setiap tahun, dipertukan aturan jelas (Wakil Presiden). 5. Gubernur Jateng, akan terjadi ketidak seimbangan jika Pemerintah Pusat memberatkan PP Pengupahan. Alasan dewan pengupahan sudah menggelar survey dan sepakat menentukan nilai UMK. Kalau semua mau gas pol, orang bisa nekat nekatan, akan terjadi tsunami, dan merugikan daerah. 6. Gubernur didesak abaikan PP Pengupahan. 7. Pandangan yang berbeda beda dari berbagai kelompok (DPRD, DPR, ahli, dsb), mendukung atau penolakan PP Pengupahan.
<p>Treatment Recommendation. (Menekankan penyelesaian)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur menyatakan perlu sosialisasi dulu untuk menjaga kondusivitas di masyarakat. 2. Gubernur Jateng harap masa transisi pelaksanaan PP no 78/2015. 3. Gubernur ajukan dispensasi penerapan PP no 78/2015. 4. Gubernur memanggil 14 bupati/walikota yang mengiskusikan upah dibawah survei KHL. 5. Apindo Jateng tak pakai PP Pengupahan, th 2016 masih menggunakan survei KHL. 6. Gubernur, pengusaha, dan buruh menyepakati formula penghitungan upah minimum tidak memakai PP Pengupahan, masih menggunakan survei KHL, kecuali Pati dan Wonosobo. 7. Sembilan Gubernur di Indonesia menetapkan upah buruh tidak sesuai DB no. 76/2012

1. Problem Identification

Problem Identification atau identifikasi masalah bisa dikaitkan dengan proses pemilihan fakta. Bagaimana realitas pengupahan buruh diliput oleh wartawan Suara Merdeka. Proses pemilihan fakta menimbulkan akibat yang jauh, karena begitu fakta didefinisikan akan selalu terjadi proses pemilihan atau penonjolan dan mengakibatkan penghilangan atas bagian tertentu dari realitas.

Suara Merdeka banyak meliput terjadinya demo buruh diberbagai kota, bahkan demo buruh diwarnai dengan bentrok. Seperti yang terjadi pada 10 Oktober di Semarang, juga tgl 28 oktober ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) berdemo menolak PP Pengupahan, dan menuntut kelayakan upah di depan Balai Kota Semarang. Demo sempat memanas ketika perwakilan buruh tidak bertemu dengan pihak pemerintah dan perwakilan dewan. Ratusan aparat kepolisian dan Satpol PP berjaga ketat dan menyiagakan mobil water canon. Sempat bentrok, tiga orang buruh yang dinilai menjadi provokator terpaksa diamankan petugas. Buruh tolak PP Pengupahan, karena dinilai merugikan buruh. PP pengupahan merupakan simbol upah murah yang dilegalikan. Buruh mengancam akan melakukan aksi buruh berikutnya kalau tuntutannya tidak dipenuhi, ada aksi demo yang lebih besar dan akan menutup jalan protokol, jalan tol, dan Bandara Achmad Yani sebagai bentuk kekecewan. Di depan Istana Negara, tanggal 30 Okt juga terjadi demo, buruh gugat PP Pengupahan. Di Jawa Barat, pada tgl 12 November, ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar menggelar aksi unjuk rasa menolak penerapan PP Pengupahan di depan Gedung Sate. Ratusan buruh di Demak juga melancarkan aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap PP Pengupahan.

Banyaknya demo buruh, menunjukkan terjadinya konflik antara pihak pihak yang berkepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kelompok pengusaha dan buruh. Menurut Rusfian (2009:7) konflik adalah bagian dari pengalaman manusia, dimana individu individu yang ada bergulat dengan stimuli yang bermacam macam, rumit dan seringkali tidak konsisten, baik dalam rangka memenuhi pemahaman terhadap lingkungan maupun terhadap diri mereka sendiri. Sedangkan Fisher (2000), mendefinisikan konflik sebagai ketidak cocokan tujuan atau nilai nilai antara kedua belah pihak atau lebih yang berhubungan, dikombinasikan dengan upaya untuk mengendalikan setiap perasaan, serta antagonis satu sama lain.

Menurut Nader, Todd dan Morrill (dalam Rusfian, 102-103), konflik merupakan satu tahan proses perselisihan atau perdebatan (disputing proses). Proses perselisihan meliputi tiga tahap, yaitu (1) ekspresi keluhan (*grievance expression*), (2) konflik (*conflict*), dan (3) perselisihan (*disputing*). Ekspresi keluhan (*grievance expression*) merupakan situasi prakonflik dimana kelompok orang mulai mempermasalahakan adanya pelanggaran norma, aturan atau standar sosial atau individual tertentu. Konflik (*conflict*) terjadi

langsung antar individu atau kelompok. Perselisihan (*disputing*) terjadi ketika konflik sudah berlangsung melibatkan intervensi pihak ketiga dan menjadi perhatian publik.

2. *Diagnose Causes.*

Diagnose Causes yaitu melihat apa atau siapa penyebab masalah dalam suatu berita. Media dalam melihat apa atau siapa penyebab masalah tentu terkait dengan yang telah diidentifikasi, sesuai dengan penonjolan atau pengaburan isu yang telah dipilih.

Dalam bingkai Suara Merdeka, penyebab terjadinya demo buruh diberbagai kota adalah , pada paket kebijakan ekonomi IV, dimana pemerintah mengeluarkan rumus baru kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tiap tahun. Cara baru hitung upah : (1) UMP tahun depan sama dengan UMP tahun ini, ditambah UPP tahun ini, ditambah UMP tahun ini dikalikan inflasi plus tingkat pertumbuhan ekonomi. Rumusnya UMP tahun depan + UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi), (2) Penghitungan UMP dilakukan tiap tahun, (3) Berlaku secara nasional mulai Januari 2016, kecuali di delapan propinsi, (4) Delapan propinsi dikecualikan karena upah saat ini belum mencapai 100% kebutuhan hidup layak (KHL). Penundaan di wilayah tersebut berlaku 4 tahun. Mulai tahun 2016 kenaikan upah minimum provinsi tidak lagi berpedoman pada hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) dan tingkat inflasi. Komponen KHL akan dievaluasi lima tahunan dan tidak mengikuti evaluasi kenaikan upah tiap tahun.

Namun RPP Pengupahan yang sekarang ini sudah ditandatangani Presiden Jokowi dan menjadi PP no 78/2015 tersebut memunculkan kontroversi. Maksud dari pemerintah mengeluarkan PP, menurut Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Istana Negara, sebenarnya untuk kepentingan buruh dan pengusaha secara seimbang. Buruh bisa menikmati upah minimum regional (UMR) secara memadai, memberi kepastian pekerja bahwa upah naik tiap tahun, dan kepastian bagi dunia usaha agar upah bisa diprediksi. Iklim investasi dan dunia usaha akan kondusif. Lapangan pekerjaan makin luas, dan calon calon tenaga kerja punya pilihan, bargaining buruh meningkat.

Peraturan Pemerintah Pengupahan didukung oleh pengusaha, Ketua Apindo (Hariadi Sukamdani) menjelaskan bahwa kebijakan baru soal pengupahan sudah tepat. Jadi terprediksi dan realitas, hal itu lebih baik karena dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pada sisi lain, timbul reaksi dari pekerja yang tergabung dalam berbagai serikat (serikat buruh, serikat pekerja, dll). Kalangan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh merasa tidak diajak bicara. "Proses pembuatan RPP Pengupahan itu tidak sesuai dengan UU no 12/2011 tentang Tata Cara Pembuatan Perundang Undangan yang mengamatkan ada pelibatan stakeholder, yaitu pekerja dan pengusaha. Hal ini juga tidak sesuai dengan

regulasi ketenaga kerjaan" menurut Timboel Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). Usulan pemerintah mengenai rumusan upah minimum tersebut bertentangan dengan pasal 89 ayat (3) UU no 13/2003 yang menyatakan "upah minimum ditetapkan gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/wali kota". Demikian pula ketua FSPI Suwardiyono, kita menolak PP Pengupahan, karena dinilai merugikan buruh. "Meskipun masih rancangan kami menolak karena RPP Pengupahan sebagai simbol upah murah yang dilegalikan. Kenaikan upah yang dirumuskan masih jauh dari harapan pekerja".

Sumber konflik menurut Daniel Katz, 1985 (dalam Fisher, 2000) , adanya tipologi yang membedakan tiga sumber konflik, yaitu ekonomi, nilai dan kekuasaan.

1. Konflik ekonomi, melibatkan motif bersaing diantara pihak pihak untuk mencapai sumber daya yang langka. Masing masing pihak ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Ini terkait dengan perebutan atau pembagian "kue ekonomi".
2. Konflik nilai, melibatkan ketidak cocokan dalam cara cara hidup, ideologi, preferensi, prinsip prinsip serta praktek praktek yang dipercaya.
3. Konflik pengaruh, terjadi ketika masing masing pihak memaksimalkan jumlah pengaruh yang dimiliki terkaait dengan pengaturan sosial. Perebutan kekuasaan terjadi dan biasanya berakhir dengan kemenangan atau kekalahan.

Sebagian besar konflik bukan hanya bersumber dari satu jenis, tetapi pada umumnya melibatkan campuran sumber konflik. Disamping hal itu, sumpert penting konflik karena komunikasi yang tidak efektif, miskomunikasi. Masing masing pihak memiliki persepsi yang berbeda tentang fakta atau situasi, masing masing pihak mementingkan diri sendiri.

3. *Moral Evaluation.*

Moral evaluation adalah penilaian terhadap penyebab masalah, dengan kata lain hal hal apa saja yang memicu timbulnya masalah dalam suatu peristiwa yang akan dikonstruksi.

Dalam bingkai Suara Merdeka penilaian moral terhadap penyebab masalah adalah beragam, tergantung pada sudut pandang masing masing kelompok. Dari pihak buruh, PP Pengupahan sebagai simbol upah murah yang dilegalikan, dan itu sangat merugikan buruh, buruh tolak PP Pengupahan. Paket kebijakan hanya menguntungkan pengusaha dan semakin memiskinkan buruh, pasalnya buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan kenaikan upah. Formulasi pengupahan merugikan buruh, karena variabel KHL ditetapkan lima tahun sekali. Sejumlah pasal dalam PP Pengupahan berimplikasi memiskinkan buruh.

Dari pihak pemerintah, diharapkan iklim investasi dan dunia usaha semakin kondusif dan akan tercipta lebih banyak lapangan kerja baru , kata

pemerintah tidak ingin antara pengusaha dan buruh terjadi suatu perbedaan pandang sepanjang tahun. Dibutuhkan aturan jelas, baik untuk buruh maupun pengusaha.

Pengusaha dukung formula UMP, mereka menyambut baik PP kebijakan baru soal pengupahan, sudah tepat, terprediksi dan realistis, serta menjamin kepastian investasi. Hal itu lebih baik karena dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. PP pengupahan tersebut visioner, melihat jauh kedepan sampai 2019. Bukan soal upah, namun kejelasan modal di Indonesia. Pengusaha sehingga investor tidak ragu menanamkan modal di Indonesia. Pengusaha tidak dihadapkan pada situasi konflik, harus bunuh bunuhan dengan pekerja. Pengusaha dan pekerja adalah mitra. Sebelumnya penetapan UMK adalah anarkisme, yang ditentukan oleh demo. Aksi demo dari buruh bisa diraham, pengusaha lebih tenang karena bisa memikirkan produksi dan pemasaran, dan penentuan upah juga bisa berjalan wajar karena tidak dicampuri urusan politik.

Direktor Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eri Hartati menyatakan bahwa kebijakan ekonomi jilid IV yang berkaitan aturan formula upah minimum provinsi dinilai belum tepat dan perlu diluruskan, sebab perhitungan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan nasional. Padahal, jika targetnya propinsi/kota/kabupaten, sebaiknya menggunakan acuan dari pertumbuhan regional dan daerah. Pakar ekonomi yang lain, Prof FX Sugyanto menilai paket kebijakan yang ditawarkan pemerintah sedikit banyak memberikan jaminan kepastian. Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf menyatakan agar Presiden tidak memaksakan pemberlakuan PP, pemerintah perlu mempertimbangkan gejala dan protes kalangan buruh dan kepala daerah. Eskalasi penolakan dikhawatirkan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebaiknya ditunda, sampai proses UMK dan UMP saat ini berjalan, sosialisasikan lebih dulu, harus dipikirkan bisa terjadi stagnasi ekonomi gara gara PP. Tasroh, dalam tulisan yang berjudul Standardisasi Formula Pengupahan mengungkapkan bahwa perlu mendorong agar RPP yang akan mengatur upah lima tahunan, memasukkan klausul bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah pusat secara tripartit nasional, bukan oleh daerah. Alasannya lebih sederhana, mudah diaplikasikan, sistem upah terpusat akan terhindar dari politisasi. Pekerja tidak dibenarkan "gelap mata" hanya berpikir haknya sendiri, tanpa memperhatikan keberlangsungan kerja. Jika hubungan industrial antara kondusif maka investor akan datang, namun jika sikap dan perilaku buruh pekerja tanpa kendali, maka investor akan genggang dari Indonesia.

Terjadinya perdebatan dari berbagai kelompok, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi serta kota/kabupaten, pengusaha, buruh, serta kelompok lain dikarenakan masing-masing memiliki persepsi atau sudut pandang yang berbeda-beda. Sesuai dengan pendapat Daniel Katz, 1993 (dalam Fisher, 2000) Sumber konflik karena komunikasi yang tidak efektif terjadi miskomunikasi. Masing-masing pihak memiliki persepsi yang berbeda

4. Treatment Recommendation

Treatment Recommendation merupakan perangkat terakhir untuk melihat saran atas penanggulangan masalah tersebut. Penyelesaian itu sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

Bingkai Suara Merdeka pada kasus penetapan upah baru terkait dengan rekomendasi cenderung memihak pada Gubernur Jateng yang tidak menggunakan PP 78/2015 untuk tahun 2016. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mendesak Gubernur Jateng mengabaikan PP no 78/2015. Serikat Pekerja minta Gubernur tunduk UU 3/2003, yaitu pengupahan berdasarkan KHL.

Gubernur harap masa transisi pemberlakuan PP. Gubernur akan ajukan dispensasi penerapan PP no 78/2015 kepada Menteri Tenaga Kerja. Hal ini akan dilakukan bila nominal UMK yang diterima buruh tahun 2016 menjadi lebih kecil jika dihitung menggunakan formula PP Pengupahan. Hasilnya akan dibandingkan. Kalau isi PP menaikkan pendapatan buruh, setidaknya sesuai dengan KHL, ya akan go saja, tapi kalau angkanya lebih tinggi KHL, minta dispensasi penerapannya.

Gubernur menetapkan UMK 2016, sesuai Keputusan Gubernur no 560/66 tahun 2015. Hanya kabupaten Pati dan Wonosobo yang menggunakan PP 78/2015, sedangkan 32 kabupaten/kota lainnya menggunakan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan Hidup Layak. Harapannya UMK dijalankan semua pengusaha di Jateng. Jika pengusaha tidak ada yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur paling lama 10 hari sebelum diberlakukan keputusan (1 Januari 2016).

Pengusaha dan buruh menerima, karena besaran upah yang disampaikan Gubernur merupakan hasil kesepakatan rapat Dewan Pengupahan yang didalamnya terdiri atas buruh, pengusaha dan pemerintah. Hal ini menunjukkan Ganjar Pranowo berhasil meyakinkan pemerintah pusat, bahwa tahun 2016 lebih baik masih menggunakan KHL, sedangkan PP diterapkan pada tahun berikutnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan peluang pelaksanaan hasil kerja lama yang berkaitan kesepakatan dan survei KHL, ini demi kesejahteraan buruh di Jateng.

Menurut Blake, Shepart & Mouton, 1984 (dalam Fisher, 2000) ada tiga strategi umum yang telah diidentifikasi, yaitu pihak pihak dapat mengambil sikap untuk menangani konflik, yaitu strategi menyangkal, strategi kalah-kalah, dan strategi menang-menang. Sedangkan Nasikun (1993) mengemukakan konflik tentu bertentangan dengan integrasi. Kedua-duanya sama-sama berjalan sebagai siklus dalam masyarakat. Jika sebuah konflik dapat terkontrol dengan baik, justru akan menghasilkan integrasi. Ada tiga cara pengendalian konflik yaitu konsiliasi (*conciliation*), mediasi (*mediation*) dan perwasitan (*arbitration*). (1) Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi,

mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Koalisi dapat terwujud melalui lembaga lembaga yang dapat menumbuhkan pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak pihak yang berkonflik.(2) Pengendalian dengan cara mediasi, adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik, (3) Pengendalian dengan cara perwasitan/arbitrasi, adalah upaya penyelesaian konflik dengan cara menunjuk pihak ketiga untuk memberikan keputusan dalam rangka penyelesaian masalah yang ada. Perbedaan dengan mediasi adalah perwasitan mengharuskan pihak pihak yang berkonflik untuk menerima apapun keputusan yang diambil pihak wasit.

Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan , terdapat kesimpulan yang berkaitan dengan bagaimana frame (bingkai) Suara Merdeka terkait dengan masalah Pengupahan buruh.

1. Suara Merdeka melihat permasalahan pengupahan buruh, sebagai konflik yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pengusaha dan pekerja . Bentuk konflik bahkan sampai terjadinya demo buruh di berbagai kota.
2. Penyebab dari munculnya konflik karena RPP tentang pengupahan buruh no 78/2015, kemudian RPP diteken Presiden Jokowi dan kemudian berlakunya PP no 78/2015.
3. Suara Merdeka menampilkan berbagai sudut pandang tentang pro dan kontra dari berbagai kelompok yang berkepentingan. Pemerintah pusat melihat PP pengupahan sebagai upaya memberi kepastian pekerja bahwa upah naik tiap tahun, dan kepastian bagi dunia usaha yang bisa diprediksi. Pengusaha merespons positif, upah buruh bisa terprediksi dan realistis, selama ini proses pengupahan buruh selalu dipolitisi dan menuntut kenaikan upah semena mena. Sedangkan kalangan Serikat Pekerja dan Buruh menolak dengan argumentasi sebagai stakeholder tidak dilibatkan, upah murah yang dilegalkan.
4. Buruh bisa bernafas lega, karena Gubernur meminta dispensasi, sehingga pada tahun 2016 masih menggunakan pengupahan dengan berdasarkan KHL , sesuai dengan Peraturan Gubernur no 560/66 tahun 2015 kearah di Pati dan Wonosobo. Pengusaha dan buruh menerima sebagai jalan tengah terbaik.

Implikasi

Penelitian ini telah memberikan gambaran bahwa media tidak hanya sekedar menghadirkan realitas pengupahan buruh kepada publik pembacanya Suara Merdeka, tetapi juga menyertakan sejumlah penilaian atau evaluasi

Pengupahan buruh yang selalu diikuti dengan berbagai demo memiliki nilai berita tersendiri yang menarik media untuk disajikan pada khalayak pembaca. Secara praktis, perlunya pihak media melakukan evaluasi dalam pembuatan bingkai terhadap suatu isu. Pihak media perlu mempertimbangkan dalam membingkai pengupahan buruh , karena bisa memicu efek demonstrasi di kalangan buruh. Prinsip jurnalisme damai tidak hanya berstandar pada data dan fakta, namun juga tanggung jawab ketika berita tersebut disajikan. Sesuai dengan semboyannya “ Perekat Komunitas Jawa Tengah”, Suara Merdeka selalu melihat ke depan, dan memanfaatkan komitmen pengabdian untuk kemajuan semua kelompok dan dunia usaha di Jawa Tengah.

Daftar Pustaka

- Eriyanto.2002. *Analisis Framing, Konstruksi, Idiologi dan Politik Media*. Yogyakarta, PT Lkis, Pelangi Aksara.
- Eriyanto.2008. *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta. PT Lkis, Pelangi Aksara.
- Fisher, Ron. C.1997, rev 1985. 2000. *Sources of conflict and Methods of Conflict Resolution*. School of Internasional Service The American University.
- LittleJohn, Stephen W. 2005. *Theories of Human Communication*. 7 th & 8 th Edition, Belmont : Wadsworth Publishing Company.
- Nasikun.1993. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : Bumi aksara.
- Rufian, Effy. 2009. *Perilaku Komunikasi Konflik*. Jakarta. Arum Mandiri Press.
- Severin, Werner J. Severin Tankard, James W. 2007. *Teori Komunikasi : Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta Kencana.
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana. Analisis Semiotika dan Analisis Framing*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Biografi Penulis

Dra. Sri Widowati Herieningsih, lahir di Salatiga 14 Maret 1956. Pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro , gol IV B dengan jabatan Lektor Kepala. Beberapa mata kuliah yang diampu : Riset Media, Riset Komunikasi Strategis, Komunikasi Kelompok, Komunikasi Antar Pribadi, dan Perilaku Konsumen.